

Pancasila dalam Arus Kosmopolitanisme dan Liberalisme untuk Membangun Identitas Kebangsaan yang Inklusif Era Modern

Alik Ulfatus Solikah^{a,1*}, Yuniarti Mellia Triana^{a,2}, Ratu Suci Sholikhah Wati^{a,3}, Meidi Saputra^{a,4}

^a Universitas Negeri Malang, Indonesia

¹ alik.ulfatus.2307128@students.um.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 Agustus 2024;

Revised: 22 Agustus 2024;

Accepted: 9 September 2024.

Kata-kata kunci:

Pancasila;

Kosmopolitanisme;

Liberalisme;

Filsafat;

Era Modern.

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini membahas terkait pemahaman yang mendalam tentang tiga paham filsafat, yaitu Pancasila, Kosmopolitanisme, dan Liberalisme di era modern yang penuh dengan dinamika dan kompleksitasnya menjadi semakin penting. Abstrak ini menggambarkan pentingnya ketiga sistem filsafat ini dalam menghadapi tantangan zaman yang berkembang pesat. Pertama, Pancasila, sebagai falsafah negara Indonesia, menegaskan nilai-nilai luhur dan cita-cita bersama dalam sebuah kerangka pemikiran yang terstruktur. Kedua, Kosmopolitanisme mengajak kita untuk memahami eksistensi manusia sebagai bagian dari komunitas global yang inklusif, menggarisbawahi nilai-nilai universalitas dan solidaritas. Ketiga, Liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu dalam mengembangkan potensi dan menjalani kehidupan tanpa campur tangan berlebihan dari pihak lain. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga sistem ini, mahasiswa dan pembaca akan mampu memperluas wawasan, memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, dan membentuk sikap serta perilaku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Penulisan artikel ini bertujuan untuk merangkum pokok-pokok bahasan yang relevan dan menggugah pemikiran kritis serta refleksi dalam menghadapi kompleksitas dunia modern yang terus berkembang.

ABSTRACT

Pancasila in the Current of Cosmopolitanism and Liberalism to Build an Inclusive National Identity in the Modern Era. The purpose of this article is to explore a deep understanding of three philosophical ideologies—Pancasila, Cosmopolitanism, and Liberalism—in the modern era, which is marked by dynamic and complex developments. This abstract underscores the significance of these three philosophical systems in addressing the rapidly evolving challenges of our time. First, Pancasila, as the state philosophy of Indonesia, affirms noble values and shared ideals within a structured framework of thought. Second, Cosmopolitanism encourages us to recognize human existence as part of an inclusive global community, emphasizing the importance of universality and solidarity. Third, Liberalism highlights the importance of individual freedom in developing one's potential and living a life free from excessive interference by others. Through a comprehensive understanding of these three systems, students and readers will be able to broaden their perspectives, deepen their understanding of human values, and cultivate attitudes and behaviors that align with the demands of the times. The article aims to summarize relevant key discussions and stimulate critical thinking and reflection in navigating the complexities of the ever-evolving modern world.

Keywords:

Pancasila;

Cosmopolitanism;

Liberalism;

Philosophy;

Modern Era..

Copyright © 2024 (Alik Ulfatus Solikah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Solikah, A. U., Triana, Y. M., Wati, R. S. S., & Saputra, M. (2024). Pancasila dalam Arus Kosmopolitanisme dan Liberalisme untuk Membangun Identitas Kebangsaan yang Inklusif Era Modern. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(9), 297–304. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i9.2485>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Topik ini menjadi sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini memungkinkan warga negara untuk lebih memahami berbagai aspek sosial, politik, dan hukum dalam konteks lokal maupun global (Anggraeni et al., 2020).

Konsep masyarakat madani, atau dikenal dengan istilah *civil society* dalam bahasa Inggris, telah lama menjadi fokus dalam diskursus sosial dan politik. Istilah ini merujuk pada komunitas politik yang beradab dan memiliki kode hukum tersendiri, sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dengan istilah *societas civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam konteks masyarakat Islam, masyarakat madani mengacu pada komunitas yang berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang menekankan nilai-nilai kebijakan umum dan keadilan, yang disebut *al-khair* (Supriatna, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep masyarakat madani telah mengalami berbagai interpretasi dan adaptasi di berbagai negara. Di dunia Barat, *civil society* berkembang sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang, sementara di dunia Islam, konsep ini dikaitkan dengan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai masyarakat Madinah yang ideal. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran kunci dalam mengembangkan konsep masyarakat madani yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat (Anggraeni et al., 2020).

Pentingnya pendidikan Kewarganegaraan terletak pada kemampuannya untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pengajaran pengetahuan teoritis, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan yang esensial untuk membentuk masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk membangun masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab, yang mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bijak (Supriatna, 2020).

Meskipun pentingnya pendidikan Kewarganegaraan telah diakui secara luas, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama dalam membentuk masyarakat madani yang ideal. Salah satu masalah utama adalah bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat secara efektif mengatasi tantangan-tantangan sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini. Arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat seringkali membuat upaya pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan menjadi kurang efektif dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Anggraeni et al., 2020).

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat dioptimalkan untuk membangun masyarakat madani yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masalah yang akan diteliti adalah sejauh mana pendidikan Kewarganegaraan saat ini mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dan budaya, serta bagaimana konsep masyarakat madani dapat diterapkan dalam konteks modern untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan dewasa secara sosial dan politik (Supriatna, 2020).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Menurut Anggraeni et al. (2020), pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku warga negara yang kritis dan partisipatif. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Kewarganegaraan seringkali tidak optimal karena kurangnya penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya yang dinamis (Supriatna, 2020).

Beberapa studi juga menekankan pentingnya pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun masyarakat madani yang kuat. Konsep ini, yang berasal dari pengalaman masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, seringkali digunakan sebagai model dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, dalam konteks modern, penerapan konsep ini membutuhkan adaptasi yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik yang berbeda-beda (Anggraeni et al., 2020).

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai bagaimana pendidikan Kewarganegaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan tradisional dalam pengajaran Kewarganegaraan, tanpa memperhatikan perkembangan teknologi dan media baru yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial dan politik warga negara. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam pendidikan Kewarganegaraan (Supriatna, 2020).

Lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan pendidikan Kewarganegaraan di berbagai negara. Sementara beberapa negara berhasil menerapkan pendidikan ini secara efektif, banyak negara lain yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan politik. Penelitian ini akan mencoba untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai konteks sosial (Anggraeni et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi-strategi yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk masyarakat madani yang responsif terhadap tantangan sosial dan budaya kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi para pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai konteks sosial.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan Kewarganegaraan. Dengan memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan pendidikan ini, hasil penelitian dapat membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep masyarakat madani dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks global yang berbeda-beda (Anggraeni et al., 2020).

Secara praktis, penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada praktik pendidikan di lapangan. Dengan mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif, para pendidik dapat lebih mudah dalam mengimplementasikan pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Ini akan membantu dalam membentuk warga negara yang lebih kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan memperkuat masyarakat madani secara keseluruhan (Supriatna, 2020).

Penelitian ini juga penting bagi pembuat kebijakan, karena dapat memberikan dasar empiris untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung penguatan pendidikan Kewarganegaraan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan demokratis (Anggraeni et al., 2020).

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks membangun masyarakat madani. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap kurikulum, metode pengajaran, serta peran pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan pelajar. Pembatasan penelitian ini meliputi keterbatasan data empiris dan

cakupan geografis yang hanya mencakup wilayah tertentu, sehingga generalisasi hasil penelitian ini mungkin terbatas.

Metode

Kajian ini memiliki fokus untuk menguraikan secara teoritis mengenai pandangan Pancasila, Kosmopolitanisme, dan Liberalisme menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep dasar dari ketiga pandangan tersebut dalam konteks sistem Filsafat. Dengan menganalisis jurnal dan literatur ilmiah, penelitian ini menggali perspektif yang mendalam mengenai hubungan antara Pancasila dan pandangan global lainnya. Hasil kajian ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam memahami bagaimana ketiga konsep ini berinteraksi dalam teori dan praktik.

Hasil dan pembahasan

Perkembangan zaman semakin terbuka dan terkoneksi secara global, hubungan antara Pancasila dan Kosmopolitanisme menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang eksistensi manusia sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas. Pancasila, sebagai falsafah negara Indonesia, tidak hanya menekankan nilai-nilai lokal, tetapi juga terbuka terhadap nilai-nilai universalitas yang diusung oleh Kosmopolitanisme (Pedju, 2019). Dalam perspektif Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa tidak hanya berarti bersatu dalam batas-batas geografis Indonesia, tetapi juga memahami bahwa manusia adalah bagian dari komunitas global yang lebih besar. Oleh karena itu, Pancasila menekankan pentingnya menghormati harkat kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal, sejalan dengan konsep Kosmopolitanisme yang mengajak kita untuk melihat manusia sebagai 'anak semua bangsa' dan menghargai keberagaman serta solidaritas di antara semua warga dunia.

Hubungan antara Pancasila dan Liberalisme menyoroti pentingnya kebebasan individu dalam mengembangkan potensi dan menjalani kehidupan tanpa campur tangan berlebihan dari pihak lain. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang menegaskan keadilan sosial dan demokrasi, menciptakan landasan yang sejalan dengan nilai-nilai Liberalisme yang menekankan kebebasan individu dalam berpikir, beragama, dan bertindak (Basit, 2023). Namun demikian, Pancasila juga menempatkan kebebasan dalam konteks tanggung jawab sosial dan keadilan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Dalam era modern yang dipenuhi dengan dinamika kompleksitas dan tuntutan perubahan, hubungan antara Pancasila dan Liberalisme menuntut keseimbangan yang cermat antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam membangun masyarakat yang dinamis dan inklusif. Untuk bisa memahami lebih detail mari kita ringkas dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hubungan Pancasila, Kosmopolitanisme, dan Liberalisme

Aspek	Hubungan Pancasila, Kosmopolitanisme dan Liberalisme		
	Pancasila	Kosmopolitanisme	Liberalisme
Fokus Utama	Nilai-nilai lokal dan global, keadilan sosial	Kesadaran global, keberagaman, solidaritas	Kebebasan individu, hak asasi manusia
Peran Individu	Individu dalam konteks tanggung jawab sosial	Warga dunia, identitas moral	Individu bebas menentukan nasib sendiri
Peran Negara	Negara bertanggung jawab menjaga keadilan sosial	Negara diakui, tetapi peran global lebih ditekankan	Negara membatasi intervensi terhadap individu
Tujuan Akhir	Keadilan dan kesejahteraan bersama	Solidaritas global dan kerukunan antar manusia	Kebebasan individu dalam ekonomi dan politik

Filosofi Pancasila adalah cara pandang yang kritis dan logis terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuannya sebagai sistem filsafat adalah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, Pancasila, yang sering dijuluki sebagai ideologi bangsa, merupakan suatu sistem filsafat yang mampu menjaga dan memelihara identitas serta pandangan khas tentang bangsa Indonesia (Utama & Dewi, 2018). Kedua, sebagai kerangka filsafat, Pancasila bertujuan untuk memelihara kehormatan dan martabat, baik secara materi maupun spiritual, bagi seluruh rakyat Indonesia (Manurung et al., 2022). Ketiga, Pancasila dihadapkan sebagai tantangan untuk menghadapi arus globalisasi dengan peran yang strategis sebagai sebuah filosofi yang menopang kedudukan bangsa Indonesia di panggung dunia (Novitasari & Najicha, 2023). Terakhir, sebagai kerangka intelektual, Pancasila berfungsi sebagai panduan yang mendasar untuk membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat Indonesia, membantu mereka menghadapi tantangan dan mengembangkan potensi secara berkelanjutan.

Berbagai aliran dalam sistem filsafat Pancasila mengeksplorasi aspek-aspek yang berbeda dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasarnya. Pertama, aliran ontologi menekankan bahwa keadilan, moralitas, dan eksistensi Tuhan membuat prinsip-prinsip inti Pancasila hadir dalam realitas agama, budaya, dan adat istiadat (Suroño et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki landasan yang kuat dalam kehidupan nyata dan bercorak spiritual. Kedua, aliran epistemologis mengeksplorasi beragam teori kebenaran, mulai dari teori korespondensi hingga teori konsensus. Dalam konteks Pancasila, kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang dapat diverifikasi secara ilmiah, memberikan manfaat praktis, atau diterima melalui kesepakatan bersama (Kirom, 2016). Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar konsep filosofis, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari.

Ketiga, dalam aksiologi, yang merupakan bagian dari Filsafat Pancasila, terdapat pembahasan mengenai nilai-nilai yang harus bermanfaat, termasuk nilai-nilai vital, materi, dan spiritual. Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik maupun rohani. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya merupakan ideal spiritual, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan praktis dan kebutuhan manusia secara menyeluruh. Sehingga, beragam aliran dalam sistem filsafat Pancasila memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dasarnya dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggali berbagai dimensi ini, Pancasila menjadi lebih dari sekadar konsep filosofis, tetapi juga menjadi pedoman yang relevan dan bermakna bagi masyarakat Indonesia.

Kosmopolitanisme adalah gagasan kuno yang menyoroti kesadaran manusia sebagai bagian dari dunia yang lebih luas, melampaui batasan-batasan nasional. Akar-akarnya dapat ditelusuri hingga pada filsuf Yunani seperti Diogenes dari Sinope dan Sokrates, yang menganggap diri mereka sebagai "warga dunia" (Nuraeni et al., 2024). Pemikiran serupa juga ditemukan dalam berbagai peradaban klasik lainnya, menekankan persaudaraan universal di antara semua manusia. Di era modern, konsep ini semakin berkembang, seiring dengan pembahasan Immanuel Kant tentang "komunitas universal" dan narasi-narasi sastra seperti yang ditemukan dalam karya Pramoedya Ananta Toer (Dian Nursita & Surwandono, 2017). Kosmopolitanisme menantang pandangan sempit dan memperluas perspektif untuk mengakui hubungan antara lokalitas dan globalitas.

Meskipun memiliki nilai-nilai positif, kosmopolitanisme juga memiliki potensi masalah, seperti kemungkinan perilaku superioritas terhadap mereka yang berpikiran sempit. Namun, dalam kerangka pandangan Ben Anderson, kosmopolitanisme tidak hanya terbatas pada perjalanan fisik, tetapi lebih pada cara pandang terhadap dunia dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan menekankan identitas moral dan keterbukaan terhadap interaksi dengan orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak, kosmopolitanisme menciptakan ruang bagi pengalaman yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dunia modern. Melalui pendekatan kosmopolitanisme, konsep ini merangkul ambiguitas antara pandangan global dan lokal, menciptakan landasan untuk pemikiran sintesis yang memadukan berbagai disiplin ilmu dalam mencari solusi sosial yang holistik. Dengan

demikian, kosmopolitanisme menjadi sebuah pandangan yang menggugah untuk memahami dan mengatasi tantangan kompleks dalam masyarakat kontemporer.

Liberalisme, sebagai doktrin yang menekankan pada kebebasan individu, telah menjadi kekuatan dominan dalam perubahan sosial dan politik sejak abad ke-18. Pemikiran ini mengakar dalam kebebasan individu untuk mengejar kesejahteraan melalui inovasi sosial dan ekonomi, terutama di Prancis dan Inggris pada masa itu (Raikhan, 2021). Berawal dari kritik terhadap kekuasaan gereja pada zaman Renaissance dan dorongan untuk membatasi kekuasaan raja dalam Revolusi Inggris, liberalisme menuntun pada tumbangannya ideologi sosialis pasca Perang Dingin, menjadikannya sebagai satu-satunya paradigma yang diakui secara global.

Konteks Indonesia, jejak demokrasi liberal pernah terlihat pada masa pemerintahan Soekarno. Meskipun saat ini Indonesia tidak lagi menganut sistem tersebut, pengaruh pemikiran liberal masih mencorak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip liberalisme yang ditegaskan oleh John Locke, seperti kebebasan beragama, hak milik, dan kebebasan individu, masih relevan dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia (Batubara et al., 2021). Negara dianggap seharusnya hanya memfasilitasi kebebasan individu tanpa campur tangan berlebihan terhadap pilihan-pilihan mereka. Dalam konteks ekonomi, sistem liberal menekankan pada kepemilikan individu atas sumber daya dan kebebasan untuk beraktivitas ekonomi, sementara harga barang dan layanan ditentukan oleh mekanisme pasar (Haris Maiza Putra et al., 2022; Khoiry et al., 2023; Muheramtohad, 2018). Pendekatan ini menekankan pada perlunya pemisahan kekuasaan dan penegakan hak milik individu. Pemikiran Locke tentang hak alamiah individu dan keterbatasan hak negara terhadapnya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam masyarakat yang menghargai kebebasan individu dan keragaman dalam berbagai aspek kehidupan.

Hubungan antara Filsafat Pancasila dan Paham Kosmopolitanisme mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai lokal dan global, serta pandangan tentang identitas dan hubungan antarmanusia. Filosofi Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pada prinsip-prinsip dasar yang mencakup keadilan, martabat, dan keutuhan bangsa. Di sisi lain, kosmopolitanisme menggarisbawahi kesadaran manusia sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas, melampaui batasan-batasan nasional. Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai ontologis seperti keadilan, moralitas, dan eksistensi Tuhan memberikan landasan bagi kesadaran akan keterhubungan antar manusia di seluruh dunia (Syarifah, 2019). Konsep ini sejalan dengan pandangan kosmopolitanisme yang mengakui persaudaraan universal di antara semua manusia, yang dapat ditelusuri hingga pemikiran kuno Yunani tentang "warga dunia".

Pancasila mempertimbangkan berbagai teori kebenaran, termasuk teori konsensus, yang menyoroti pentingnya kesepakatan bersama dalam menentukan nilai-nilai yang universal. Ini sejalan dengan konsep kosmopolitanisme yang menekankan identitas moral dan keterbukaan terhadap hubungan dengan orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak. Dalam aksiologi, Pancasila mempertimbangkan nilai-nilai vital, materi, dan spiritual, yang mengakui kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencerminkan pandangan kosmopolitanisme tentang pentingnya menghargai kebutuhan manusia secara menyeluruh, tanpa memandang batasan-batasan geografis atau budaya. Kesimpulannya, hubungan antara Filsafat Pancasila dan Paham Kosmopolitanisme menggambarkan pendekatan yang holistik dalam memahami kompleksitas hubungan antarmanusia di era globalisasi. Keduanya memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai lokal dapat bersinergi dengan pandangan global untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan antara Pancasila dan paham Liberalisme mencerminkan dinamika antara nilai-nilai lokal dan global dalam konteks Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pada keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal yang meliputi keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kerukunan antarumat beragama. Di sisi lain, paham Liberalisme menyoroti pentingnya kebebasan

individu, hak asasi manusia, dan peran terbatas negara dalam urusan pribadi. Secara konseptual, Pancasila dan Liberalisme memiliki titik-titik persamaan dalam penekanan pada kebebasan individu (Nasution et al., 2023). Meskipun mungkin dengan penekanan yang berbeda, keduanya menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri. Pancasila mengakui hak-hak asasi manusia dalam sila-sila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah, sementara Liberalisme menekankan pada hak-hak individu seperti kebebasan beragama dan hak milik.

Perbedaan muncul dalam konteks implementasi dan penafsiran nilai-nilai ini. Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan landasan untuk memelihara harmoni sosial dan keadilan di Indonesia dengan mempertimbangkan konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Di sisi lain, paham Liberalisme, dengan penekanan pada kebebasan individu yang lebih absolut, cenderung menyoroti perlunya keterlibatan minimal negara dalam urusan individu. Bidang ekonomi, Pancasila menegaskan pentingnya kepemilikan kolektif dan distribusi kekayaan yang merata sebagai bagian dari konsep kesejahteraan bersama, sementara Liberalisme menekankan pada pasar bebas dan kepemilikan individu sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kedua konsep ini menekankan pada pentingnya menghormati hak-hak individu untuk memiliki dan mengembangkan kekayaan mereka sendiri.

Sehingga, hubungan antara Pancasila dan paham Liberalisme mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan global dalam pembentukan identitas dan kebijakan di Indonesia. Keduanya menawarkan pandangan yang komplementer dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal sambil mengakui pentingnya kebebasan individu dan hak asasi manusia secara universal.

Simpulan

Simpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pancasila, Kosmopolitanisme, dan Liberalisme, meskipun memiliki perspektif yang berbeda, saling melengkapi dalam membentuk pandangan tentang kehidupan bermasyarakat. Pancasila menekankan pentingnya harmoni sosial dan keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan keberagaman, yang relevan dalam konteks Indonesia. Di sisi lain, Kosmopolitanisme memperluas wawasan dengan mengakui kompleksitas dunia global dan pentingnya kesadaran sebagai bagian dari komunitas global yang lebih luas. Liberalisme, dengan fokus pada kebebasan individu dan hak asasi manusia, menawarkan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak individu sambil membatasi intervensi negara dalam urusan pribadi. Pemahaman yang holistik terhadap ketiga konsep ini dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi pembentukan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap tantangan global di era modern.

Referensi

- Achadi, M. W., Ag, S., & Ag, M. (2020). *Dr. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.*
- Azizah, N. P., Andrina, N. C., & Andrea, S. K. (2023). *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*. 2(7), 514–520.
- Basit, A. (2023). Comparison of Concepts and Practices of Citizenship Between Liberal Democracy and Pancasila Democracy. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 86–99. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.135>
- Batubara, U. N., Royhanun Siregar, & Siregar, N. (2021). *Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatahidupan*. 9(4), 485–491.
- Chrysostomos, L. (2021). *Kosmopatriotisme Digital : Kosmopolitanisme Tantangannya dan Prospek Pendidikan Berdimensi*. 4(1), 19–36.
- Dian Nursita, R., & Surwandono, S. (2017). Gagasan Democratic Peace Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat. *Journal of Islamic World and Politics*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jiwp.1102>
- Halunaza, H. (2017). *Globalisasi sebagai katalis kosmopolitanisme dan multikulturalisme: studi kasus resistance cina terhadap kosmopolitanisme*. 1(2), 177–189. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>

- Haris Maiza Putra, Hisam Ahyani, Dede Abdurrohman, Naeli Mutmainah, & Memet Slamet. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 196–211. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan. *Islamic Education*, 1(1), 446–455. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/584>
- Kirom, S. (2016). Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 99–117. <https://doi.org/10.22146/jf.3111>
- Manurung, Y., Saragih, H., & Sarjito, A. (2022). Martabat Bangsa Dan Negara Di Atas Segala-Galanya: Tinjauan Aksiologis Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Bela Negara. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 21–30. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Muheramtohad, S. (2018). Ekonomi Kerakyatan Versus Ekonomi Liberal Dalam Pandangan Fiqh Muamalah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3698>
- Nasution, T., Hairini Siregar, N., Luthfiansyah, F. A., Ramadhani, N., Angkat, C. T. D. E., Sihite, R. N., Pohan, D. A., Marunduri, R. A., Panjaitan, M. F., Aulia, R. G., Nasution, M., & Andrika, N. (2023). *educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan) Persamaan Dan Perbedaan Sistem Demokrasi Indonesia Dengan Negara Lain*. 02(01), 23–32.
- Novitasari, S., & Najicha, F. U. (2023). *Pentingnya Peran Pancasila bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Globalisasi*. June, 1–11.
- Nuraeni, I. L., Alvi, M., & Fakultas, P. (2024). *Kajian Hukum Dan Keadilan Dalam Cynics*. 1–14. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Parinata, D., & Puspaningtyas, N. D. (2022). Studi Literatur: Kemampuan Komunikasi Metematis Mahasiswa Pada Materi Integral. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik (JI-MR)*, 3(2), 94.
- Pedju, R. P. (2019). Analisa Konsep Universalitas Nilai Islam Dan Pancasila (Studi Pemikiran Yudi Latif). *Potret Pemikiran*, 23(2), 99. <https://doi.org/10.30984/pp.v23i2.995>
- Raikhan, R. (2021). Liberalisme dan Kesadaran Naif; Studi Kritis Pemikiran Pendidikan John Locke Dan John Dewey. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 101–112. <https://doi.org/10.58518/darajat.v4i2.812>
- Surono, S., Murtiningsih, R. S., & Santoso, H. (2021). Landasan Ontologis Pengembangan Antropologi Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 296–304. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.28206>
- Syarifah, C. (2019). Pancasila dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Menuju Masyarakat Kosmopolitan. *Kedaulatan Indonesian Perspective*, 4(1), 21–39.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*. 13(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>